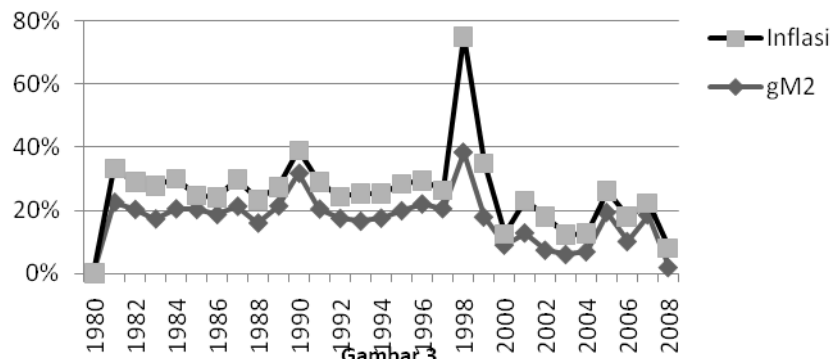


positif pertumbuhan uang beredar terhadap inflasi juga terjadi pada tahun-tahun lainnya, baik pada periode sebelum krisis ekonomi tahun 1998, maupun pada periode setelahnya.



Gambar 3
Perkembangan Inflasi dan Jumlah Uang Beredar (M2) di Indonesia Periode 1980-2008

Pelaksanaan kebijakan moneter melalui penetapan *BI rate* akan mempengaruhi suku bunga sektor perbankan. Perkembangannya akan mempengaruhi kondisi pasar uang yang selanjutnya akan memberikan kontribusi terhadap inflasi. Data empiris perekonomian Indonesia menunjukkan bahwa kebijakan moneter melalui pengendalian suku bunga sangat berhubungan dengan target pemerintah mengendalikan inflasi.

Pola perkembangan inflasi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya disajikan dalam persamaan regresi di bawah ini ;

$$p_t = -1,01 - 0,000624 i_t + 0,116 M^s_t + 0,000012 e_t + 0,416 G_t$$

$$(-5,21)^* \quad (-0,70) \quad (2,21)^* \quad (2,23)^* \quad (4,52)^*$$

(S = 0,02474 R-Sq = 99,6% R-Sq(adj) = 99,5%, F=1483,24, P=0,000)

Angka dalam kurung menunjukkan nilai t statistik

* = signifikan pada level 5%

Keterangan :

p = tingkat perkembangan harga (log CPI)

i = suku bunga (BI Rate)

M^s = pertumbuhan jumlah uang beredar dalam arti luas, M2 (log Ms)

e = Kurs rupiah terhadap US \$ (Rp/\$)

G = Pertumbuhan Belanja Pemerintah (log G)

Perkembangan inflasi signifikan dipengaruhi oleh pertumbuhan jumlah uang beredar luar (M2), nilai tukar (kurs) rupiah dan pertumbuhan belanja pemerintah. Peningkatan jumlah uang beredar, depresiasi rupiah terhadap US \$ dan peningkatan anggaran

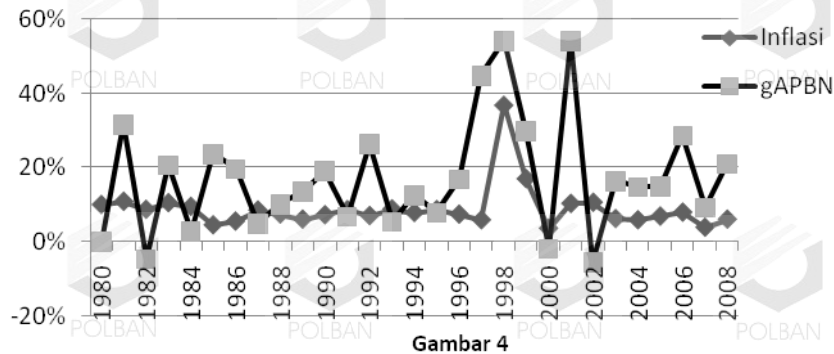
belanja pemerintah akan memacu peningkatan inflasi di Indonesia. Kondisi ini sesuai dengan target dan tujuan pemerintah dalam rangka mencapai stabilitas rupiah melalui kebijakan moneter. Inflasi merupakan fenomena moneter, sehingga proses stabilisasi nilai rupiah dapat dilakukan melalui perubahan variable-variabel ekonomi kebijakan moneter. Bunga (*BI rate*) merupakan satu-satunya variabel dalam model yang terbukti tidak signifikan mempengaruhi perkembangan inflasi di Indonesia. Peningkatan suku bunga berpengaruh terhadap penurunan permintaan uang dan secara tidak langsung mempengaruhi penurunan tingkat inflasi di Indonesia.

Nilai tukar rupiah terhadap US\$ secara signifikan berpengaruh terhadap tingkat inflasi di dalam negeri. Peningkatan nilai tukar rupiah (rupiah terdepresiasi) mengakibatkan tingkat inflasi di dalam negeri mengalami peningkatan. Indonesia merupakan Negara dengan sistem perekonomian terbuka dengan tingkat ketergantungan industri dalam negeri terhadap komponen impor cukup tinggi. Depresiasi rupiah mengakibatkan peningkatan biaya dan menurunnya tingkat produksi. Peningkatan komponen impor di dalam negeri menyebar mempengaruhi peningkatan harga-harga produk di dalam negeri baik produk domestik maupun produk impor. Secara keseluruhan tingkat inflasi di dalam negeri akan mengalami peningkatan seiring dengan kenaikan kurs rupiah terhadap USD.

Hubungan langsung antara pengeluaran pemerintah (APBN) dan inflasi juga menunjukkan hubungan yang positif seperti yang tergambar pada grafik di bawah ini. Pada saat pemerintah menetapkan kebijakan fiskal ekspansif maka akan menyebabkan peningkatan laju inflasi. Hal ini dapat dimengerti karena peningkatan pengeluaran pemerintah akan meningkatkan *aggregate demand* sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan harga-harga secara umum (inflasi). Peningkatan laju inflasi yang diakibatkan oleh peningkatan pengeluaran pemerintah juga terjadi pada tahun 1980, pada saat itu pertumbuhan pengeluaran pemerintah mencapai 48.6 % sedangkan laju inflasi mencapai 18 %.

Dampak positif pertumbuhan pengeluaran pemerintah terhadap laju inflasi dapat dilihat juga tahun 1998 dan pada tahun 2000. Pada tahun 1998, ketika pertumbuhan pengeluaran pemerintah meningkat sampai 54 %, ternyata diikuti peningkatan laju inflasi sebesar 58 %, sedangkan pada saat pertumbuhan pengeluaran pemerintah menurun sampai tingkat 2 % pada tahun 2000, laju inflasi juga menurun sampai tingkat 3.7 %.





Gambar 4
Perkembangan APBN dan Inflasi di Indonesia
Periode 1980-2008

Hubungan kebijakan moneter dengan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari model persamaan regresi di bawah ini.

$$y_t = 4,52 - 0,00146 i_t + 0,264 M_t^S - 0,000020 e_t + 0,0555 G_t$$

(33,28) (-2,32)* (7,16)* (-5,30)* (0,86)

(S = 0,01740, R-Sq = 99,1%, R-Sq(adj)=98,9%, F=612,04 dan P=0,000)

Angka dalam kurung menunjukkan nilai t statistik

* = signifikan pada level 5%

Keterangan :

y_t = tingkat pertumbuhan ekonomi (log GDP)

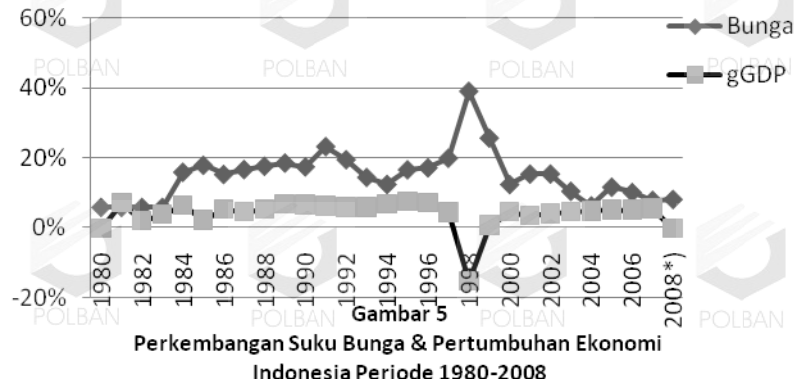
i_t = suku bunga (BI Rate)

M_t^S = pertumbuhan jumlah uang beredar dalam arti luas, M2 (log M_t^S)

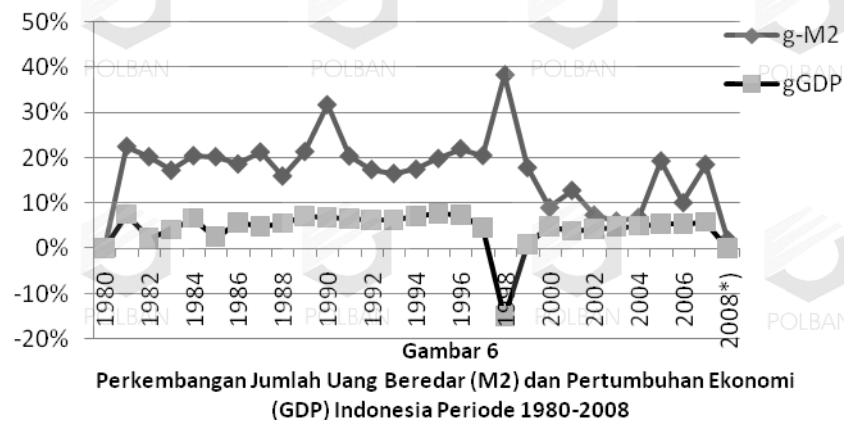
e_t = Kurs rupiah terhadap US \$ (Rp/\$)

G_t = Pertumbuhan Belanja Pemerintah (log G)

Suku bunga, perkembangan jumlah uang beredar dan kurs rupiah terhadap USD signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pengaruh negatif suku bunga terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa perubahan suku bunga akan mempengaruhi *aggregate expenditure* melalui perubahan investasi. Kenaikan suku bunga akan menurunkan minat investasi dan menurunkan aktivitas ekonomi sehingga pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi. Pada tahun 1980, saat suku bunga deposito diturunkan pada tingkat 6 %, pertumbuhan ekonomi pada saat itu meningkat sampai 9.8 %. Sedangkan pada saat bunga deposito ditingkatkan menjadi 18 % pada tahun 1985, membuat pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan.



Pertumbuhan uang beredar signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Setiap perubahan uang beredar, baik karena perubahan uang primer, uang giral maupun karena perubahan uang kuasi pada sektor perbankan, akan memberikan dampak searah terhadap pertumbuhan ekonomi. Setiap kenaikan sebesar 1% dari uang beredar akan mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 0,26%. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa aktivitas ekonomi Indonesia masih berada di bawah kapasitas penuhnya. Pada kondisi ini setiap peningkatan jumlah uang beredar melalui penerapan berbagai instrumen kebijakan moneter akan mendorong peningkatan aktivitas dan pertumbuhan ekonomi.



Nilai tukar rupiah terhadap USD secara signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Peningkatan nilai tukar rupiah (rupiah terdepresiasi) mengakibatkan pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi. Dengan tingkat ketergantungan terhadap komponen impor cukup tinggi, depresiasi rupiah mengakibatkan peningkatan biaya produksi dan menurunnya tingkat produksi di dalam negeri. Peningkatan harga komponen impor di dalam negeri menyebar mempengaruhi peningkatan harga-harga di dalam negeri sehingga produk domestik tidak kompetitif baik di pasar domestik

maupun di pasar internasional. Menurunnya tingkat produksi akibat depresiasi rupiah mengakibatkan pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi.

Hubungan pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi menunjukkan hubungan positif. Peningkatan pengeluaran pemerintah berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dampak positif paling nyata terlihat pada saat pengeluaran pemerintah meningkat sebesar 12.5 % pada tahun 1994 daripada tahun sebelumnya yang hanya sebesar 5.3 %, pertumbuhan ekonomi juga meningkat sebesar 7.5 % daripada tahun sebelumnya yang hanya 6.5 %. Pada saat krisis tahun 1998 hubungan tersebut tidak stabil, ketika pengeluaran pemerintah meningkat sampai 54.2% pada tahun 1998, ternyata pertumbuhan ekonomi pada tahun tersebut malah mengalami penurunan sampai tingkat 13 %. Hubungan antara pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi terbukti tidak signifikan, sehingga peran belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi masih dipertanyakan.

Berdasarkan persamaan regresi di atas dapat dijelaskan bahwa proses stabilitasi dan pertumbuhan ekonomi secara signifikan hanya dipengaruhi oleh variabel-variabel yang terkait langsung dengan kebijakan moneter. Belanja pemerintah secara signifikan terbukti belum mampu mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi. Kontribusi belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi untuk kasus Negara berkembang seperti Indonesia, tidak hanya ditentukan oleh jumlah tapi juga oleh produktivitas dan porsi pemanfaatan (kebocoran) alokasi belanja tersebut. Tingkat produktivitas dan kebocoran belanja pemerintah akan menentukan nilai multiplier perekonomian dan tingkat pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hasil penelitian ini patut diduga bahwa tidak berpengaruhnya belanja pemerintah terhadap peningkatan aktivitas perekonomian disebabkan oleh masih rendahnya tingkat produktivitas perekonomian dan tingginya tingkat kebocoran anggaran belanja pemerintah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Implementasi pelaksanaan kebijakan moneter terhadap kondisi Inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat dinyatakan sebagai berikut :

- Peningkatan jumlah uang beredar dan depresiasi nilai tukar rupiah terhadap USD signifikan berpengaruh terhadap peningkatan kondisi inflasi di Indonesia.
- Kebijakan perubahan suku bunga oleh Bank Indonesia terbukti tidak signifikan mempengaruhi kondisi inflasi di Indonesia. Kebijakan penetapan suku bunga oleh

Bank Indonesia tidak bisa diandalkan untuk mempengaruhi kondisi inflasi di Indonesia.

- Suku bunga, jumlah uang beredar dan nilai tukar rupiah terhadap USD terbukti secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Penurunan suku bunga, peningkatan jumlah uang beredar dan apresiasi nilai tukar rupiah terhadap USD akan mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi.
- Selain variabel kebijakan moneter, variabel kebijakan fiskal berupa nilai belanja pemerintah juga mempengaruhi tingkat perkembangan inflasi di Indonesia. Peningkatan anggaran belanja pemerintah akan mendorong terjadinya peningkatan inflasi.
- Perubahan posisi anggaran belanja pemerintah terbukti tidak signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Besarnya nilai belanja pemerintah tidak bisa diandalkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kondisi ini diperkirakan terjadi karena rendahnya tingkat produktivitas dan tingginya kebocoran dari setiap proyek yang dibiayai oleh pemerintah.

Saran

- Upaya untuk mempertahankan tingkat inflasi yang rendah disertai dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan sulit untuk dilakukan bila hanya mengadakan kebijakan moneter. Perlu upaya ter-integratif dan kerjasama antara Bank Indonesia dan pemerintah dalam merumuskan target dan implementasi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal di Indonesia.
- Target kebijakan moneter difokuskan pada upaya mencapai stabilitas nilai rupiah melalui pengendalian inflasi dan pengendalian aspek eksternal (stabilitas nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing). Target kebijakan fiskal difokuskan pada upaya peningkatan efektivitas kebijakan melalui peningkatan produktivitas dan penurunan tingkat kebocoran belanja pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Arif, M. M. dan A. Tohari, (2006), *Peranan Kebijakan Moneter Dalam Menjaga Stabilitas Perekonomian Indonesia Sebagai Respon Terhadap Fluktuasi Perekonomian Dunia.*, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan. Oktober, Vol. 9 (2): 145 - 177.

Asmanto, Priadi dan Soebagyo (2007), *Analisis Pengaruh Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal regional Terhadap Stabilitas Harga dan Pertumbuhan Ekonomi Regional di Jawa Timur (Periode 1995-2004)*, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, April, Volume 9 Nomor 4.

Bank Indonesia, *Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI)*, Berbagai Terbitan. Laporan Tahunan Perekonomian Indonesia, Berbagai Terbitan.

Bank Indonesia (2004), *Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Di Indonesia, Seri kebanksentralan*, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK), Bank Indonesia, Jakarta, Mei 2004

D. Zulverdi, (1998), *.Penggunaan Suku Bunga Sebagai Sasaran Operasional Kebijakan Moneter di Indonesia.*, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Juli, Vol. 1 (1): 25-58.

Gujarati, D. N., (2003), *Basic Econometrics*, Fourth Edition, Singapore: McGraw-Hill.

Haryono, E., W. A. Nugroho dan W. Pratomo, (2000), *Mekanisme Pengendalian Moneter Dengan Inflasi Sebagai Sasaran Tunggal.*, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Maret, Vol 1(1): 73 - 74.

Julaihah, U. dan Insukindro, (2004), *Analisis Dampak Kebijakan Moneter Terhadap Variabel Makroekonomi di Indonesia Tahun 1983.1 - 2003.2.*, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, September, Vol. 7 (2): 323 - 341.

Keating, J.W 1992, *Structural Approaches to Vector Autoregressions*, Federal Reserve Bank St.Louis Review, 74(5):37-57

Mankiw, N.G. (2003), *Teori Makroekonomi*, terjemahan, Erlangga, Jakarta.

Mishkin, F.S. (2004), *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets*, Colombia University.

Nova Riana Banjarnahor, (2008), *Mekanisme suku bunga sbi sebagai sasaran perasional Kebijakan moneter dan variabel makroekonomi Indonesia*, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan ; 1990.1 - 2007.4, Juli 2008.

Nuryati, Y., H. Siregar dan A. Ratnawati, (2006), *Dampak Kebijakan Inflation Targeting Terhadap Beberapa Variabel Makroekonomi di Indonesia.*, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Juni, Vol. 9 (1): 113 – 134.

Simorangkir, Iskandar (2007), *Koordinasi kebijakan moneter dan fiskal di indonesia: Suatu kajian dengan pendekatan game theory*, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Januari 2007.

Solikin M. Juhro, (2007), *Karakteristik tekanan inflasi di indonesia: Pengaruh dinamis sisi permintaan-penawaran dan Prospek ke depan*, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Januari 2007.

Solikin, M. Juhro (2005), *Analisis Kebijakan Moneter Dalam Model Makroekonometrik Struktural Jangka Panjang: Structural Cointegrating Vector Autoregression.*, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, September, Vol. 8 (2): 191 - 229.

Tinjauan Kebijakan Moneter,(2008), *Biro Kebijakan Moneter*, Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter. Bank Indonesia, Mei 2008.

Warjiyo, P., (2004), *Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter di Indonesia*, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK), Bank Indonesia, Jakarta.



POLBAN



POLBAN



POLBAN



POLBAN



POLBAN



POLBAN

Iwan Setiawan



POLBAN



POLBAN



POLBAN



POLBAN



POLBAN



POLBAN



POLBAN



POLBAN



POLBAN



POLBAN



POLBAN



POLBAN



POLBAN



POLBAN



POLBAN



POLBAN



POLBAN



POLBAN



POLBAN



POLBAN



POLBAN



POLBAN



POLBAN



POLBAN



POLBAN



POLBAN



POLBAN



POLBAN



POLBAN



POLBAN



POLBAN



POLBAN



POLBAN



POLBAN



POLBAN



POLBAN



POLBAN



POLBAN



POLBAN



POLBAN



POLBAN



POLBAN



POLBAN



POLBAN



POLBAN



POLBAN



POLBAN



POLBAN